

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul Halim (2007), Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah), Jakarta : Salemba Empat Abdul.
- Abdullah, Thamin & Francis Tantri. 2012. Manajemen Pemasaran , Jakarta : Rajawali pers.
- Azlim, dkk, 2002. “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh.”
- Batian Indra 2010. Sistem Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Salemba Empat
- Eko Setiawan, 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan. JOMFEKON ISSN 2355-66854 Vol.1 No.2
- Halim, Abdullah. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat: Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Ardi. Yogyakarta.
- Kasmin, (2012), Analisis Laporan Keuangan, Jakarta: PT Raja Gavindo Persada.
- Mardi, 2011. Sistem Informasi Akuntansi, Bogor: Ghalio.
- Mardiasmo,2002. Tata Pemerintahan (*Good Governance*)
- Mursyidi. 2010. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, Cetakan kedua. Bandung: Refina Aditama.
- Mursyidi. 2010. Akuntansi Dasar Bogor: Ghalio Indonesia.
- Nazir Mohammad, 2011. Metode Penelitian, Cetakan G. Bogor: Penerbit Ghalio Indonesia.
- Sedarmayanti. *Good Governance* dan *Good Colporate Governance*. Bagian Ketiga Bandung. CV, Mandar Maju.
- Sutiono, Agus dan Ambar T.S., 2004. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah dalam Birokrasi Publik di Indonesia, Gava Media, Edisi Pertama PP. 20-26 Undang-Undang No.17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RKD. Bandung: Alfabeta
- Yujana, Lalu Hendri., 1999. Akuntansi Pemerintahan Edisi Kedua Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta.

**Jurnal :**

- Ade Saputra. 2015. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
- Adhi. Daniel Kartika dan Suhardjo Yohaner “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Tual). ISSN : 2252-7826). Volume 5 No 1. Semarang : STIE Semarang.
- Desmaria Puji. 2017. Pengaruh *good governance*, penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal pemerintahan dan kompetensi aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada satuan kerja kementerian pariwisata.
- Dicky Rahman. 2015. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- Eka Danofi R. 2014. Pengaruh pemahaman atas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.
- Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti. 2014. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada skpd buleleng).
- Rita Andiani, SE,MM. 2016. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan di kota semarang.
- Rukmi Juita. 2013. Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
- Shannaz Erdina Suryadi. 2013. Pengaruh *good governance* dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- T. Asri Yunita. 2015. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, Sistem pengendalian internal dan kompetensi staf Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah (studi pada skpd kota dumai).
- Yohanes Suhardjo. 2013. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada pemerintahan kota tual).

**Peraturan Pemerintah :**

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah dalam Negeri No. 21 tahun 2011 Tentang Pedoman Keuangan Daerah

Peraturan Walikota Bandung Nomor 322 tahun 2010 Aparatur Pemerintah.

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Laporan Keuangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**Internet :**

<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/06/12/laporan-keuangan-kota-bandung-wdp-lagi-ridwan-kamil-tetap-optimistis-403070>

<https://news.detik.com/jawabarat/4045429/kota-bandung-bandung-barat-dan-subang-gagal-raih-opini-wtp>

<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/05/04/p879mh335-iai-nilai-kualitas-pelaporan-keuangan-pemerintah-rendah>